



## Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

**Sir Haykal Alam Amirullah<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>1</sup>

[sirhaykal@gmail.com](mailto:sirhaykal@gmail.com)<sup>1</sup>

**Muhammad Yazid<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>2</sup>

[Muhammadyazid02@gmail.com](mailto:Muhammadyazid02@gmail.com)<sup>2</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.394>

### Abstract

*This study aims to determine various Islamic monetary policies that can be used to deal with economic crises such as monetary crises and inflation. Monetary policy is a policy carried out by the central bank in this case is BI (Bank Indonesia) to regulate the amount of money in circulation and interest rates. However in the Islamic perspective, the interest rate is a form of usury, so in the Islamic perspective the interest rate is changed to zakat of 2.5%. Through the library research methodology, researchers collect data from previous journals and several books to find out what models can be done by Islamic monetary policy in dealing with economic crises. The results of the study show Islamic monetary policy models that can be used to deal with economic crises such as 1) Reserve Ratio, 2) Moral Suassion, 3) Lending Ratio, 4) Refinance Ratio, 5) Profit Sharing Ratio, 6) Islamic Sukuk, 7) Government Investment Certificate, and 8) Sharia mutual funds. This study provides an understanding of various models of Islamic monetary policy to avoid usury to overcome economic crises. And this proves that sharia-based monetary policy can compete in modern times today.*

**Keywords:** *Islamic monetary policy, economic crisis, usury.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan moneter islam yang bisa digunakan untuk menghadapi krisis ekonomi seperti krisis moneter dan inflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam hal ini adalah BI (Bank Indonesia) untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga, namun dalam perspektif islam suku bunga adalah salah satu bentuk riba maka pada perspektif islam suku bunga diubah menjadi zakat sebesar 2,5%. Melalui metodologi library research peneliti mengumpulkan data dari jurnal terdahulu dan beberapa buku untuk mencari model apa saja yang bisa dilakukan oleh kebijakan moneter islam dalam menghadapi krisis ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan model kebijakan moneter islam yang bisa digunakan untuk menghadapi krisis ekonomi seperti 1) Reserve Ratio, 2) Moral Suassion, 3) Lending Ratio, 4) Refinance Ratio, 5) Profit Sharing Ratio, 6) Islamic Sukuk, 7) Government Investment Certificate, dan 8) Reksadana syariah. Penelitian ini memberi pemahaman berbagai model kebijakan moneter islam untuk menghindari riba untuk mengatasi krisis ekonomi. Dan ini membuktikan bahwasannya kebijakan moneter berbasis syariah bisa bersaing di zaman modern seperti sekarang.

**Kata kunci:** *kebijakan moneter islam, krisis ekonomi, Riba.*

## **Pendahuluan**

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dan kebijakan moneter menurut islam untuk pengelolaan uang yang berbasiskan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas harga dan perekonomian, serta mendistribusikan kekayaan secara adil.

Kondisi perekonomian suatu negara sangat ditentukan oleh peranan uang dalam perekonomian dan sistem moneter yang dijalankannya. Hubungan uang dan perekonomian secara alamiah saling bersinergi. Peran uang dalam perekonomian bagaikan aliran darah dalam tubuh manusia. Tanpa aliran darah manusia tidak dapat hidup. Begitu juga perekonomian akan suatu negara akan mengalami kelesuan bahkan krisis yang berkepanjangan jika kondisi keuangan selalu tidak stabil<sup>1</sup>. Maka tak dapat dipungkiri kalau uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian.<sup>2</sup>

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menciptakan nilai tukar yang stabil, sistem pembayaran yang stabil, sistem keuangan yang sehat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap krisis ekonomi biasanya dimulai dengan sektor mata uang yang bermasalah. Berbagai permasalahan dalam aktivitas keuangan pada lembaga keuangan, seperti asimetri informasi, seringkali memberikan dampak negatif terhadap pasar keuangan<sup>3</sup>

Kebijakan moneter merupakan hal yang paling penting dalam pengendalian perekonomian nasional. Meski demikian perbedaan sistem ekonomi yang berlaku akan memunculkan pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi moneter islam merupakan sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, dalam moneter islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqashid syariah menegakkan keadilan (Iqamah al' Adl) yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (jalb al masalah), yaitu menghasilkan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Isep Amas Priatna Helin G Yudawisastra, Kasful Anwar, Hesti Umiyati, Ahmad Zainuddin Syarifuddin Sulaiman, Budi Rustandi Kartawinata, Umar, and Roikhan Mochamad Aziz. Sattar, Edi Murdiyanto, Taufik Akbar, Amalia Wahyuni, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*, 2022.

<sup>2</sup> Heri Irawan et al., "Ekonomi Moneter Islam," *Az-Zahra Media Society* 3, no. 1 (2023): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>3</sup> F Shakira et al., "Kebijakan Moneter Menurut Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Penyebab Krisis Moneter," *Brilian Dinamis* ... 6, no. 3 (2024): 15–30, <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/article/view/2550%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/article/download/2550/2577>.

<sup>4</sup> Dea Putri Ananda et al., "Kebijakan Moneter Dalam Islam," *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 120–25, <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2864>.

## **Metode Penelitian**

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Studi research library yang merupakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dan dihimpun dari macam-macam literature. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang tujuannya untuk menggabungkan informasi dan bahan dari sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, catatan, ataupun laporan<sup>5</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu atau topik tertentu secara mendalam serta memahami fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa langkah awal seperti menentukan topik penelitian dan menemukan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik tersebut. Setelah itu, peneliti membaca dan mencermati setiap informasi yang ada pada literatur tersebut serta menyusun sebuah kerangka konsep berdasarkan temuan-temuan penting dari bahan pustaka.

Selanjutnya, peneliti mengolah data-data tersebut menjadi analisis deskriptif atau interpretatif sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang isu atau fenomena sosial yang sedang ditelaah. Hasil akhir dari analisis biasanya disajikan dalam bentuk makalah ilmiah ataupun laporan hasil penelitian. Jenis penelitian ini juga relatif mudah dilakukan karena tidak memerlukan biaya tinggi seperti halnya jika harus melakukan survei langsung ke lapangan.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/ kesempatan kerja yang tersedia.

Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Saiful Annur, "Saiful Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif)," (Palembang: Noer Fikri, 2014). 1 37," 2014, 37-44.

Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.<sup>6</sup>

### **Sistem Moneter Menurut Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem moneter berfokus pada penggunaan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tidak sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dalam semua transaksi keuangan, termasuk pemberian kredit dan pinjaman. Sistem moneter Islam menekankan pada penggunaan uang untuk memfasilitasi transaksi riil, bukan untuk spekulasi. Selain itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa) untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif<sup>7</sup>.

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di bandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. di gunakan bimatalic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah saw. ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10, namun demikian, setabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Misalkan pada masa Bani Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15<sup>8</sup>.

Pada masa yang lain nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35-1:50. Instabilitas dalam nilai tukar yang ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins out of circulations atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini di sebut hukum Gresham. Seperi yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328), dimana mata uang yang beredar tersebut dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak . oleh Ibnu Taimiyah di katakana bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu:

- a) *The gold cins standard*: di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
- b) *The gold bullion standard*: di mana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
- c) *The gold exchange standard (bretton woods system)*: di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di back- up secara

---

<sup>6</sup> Perry Warjiyo and Solikin, *Kebijakan Moneter Indonesia, Jurnal Manajemen Maranatha*, vol. 3, 2003.

<sup>7</sup> Shakira et al., "Kebijakan Moneter Menurut Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Penyebab Krisis Moneter."

<sup>8</sup> Ananda et al., "Kebijakan Moneter Dalam Islam."

## ***Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi - Sir Haykal Alam Amirullah dan Muhammad Yazid***

penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (*kredit money*) yaitu uang yang keberadaannya tidak ditopang oleh emas dan perak<sup>9</sup>.

Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian di suatu Negara ke arah atau konsini yang ingin di capai. Kebijakan moneter pada ekonomi islam hanya sebagai pelengkap untuk sektor riil. Pada ekonomi islam tidak mengakui adanya instrumen bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal itu jelas di dalam al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil. Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah<sup>10</sup>.

Kebijakan ekonomi yang ada menurut perspektif islam adalah kebijakan yang harus lebih manusiawi dalam hal menciptakan keadilan sosial, baik itu secara statis maupun secara dinamis. Pada setiap kegiatan ekonomi islam yang pada umumnya akan di pegang oleh pihak pemerintah akan tetapi kegiatan-kegiatan ekonominya akan berazaskan islam. Kebijakan ekonomi sebenarnya mengandung makna bahwa pemanfaatan alat alat yang ditujuankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. Sebenarnya kebijakan ekonomi ini telah lama diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian yaitu sejak zaman Rasulullah SAW sistem kebijakan ekonomi yang berbasis islam ini telah di praktekkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya yang tidak memberlakukan uang atau bunga<sup>11</sup>.

Salah satu ciri sistem moneter Islam adalah tidak adanya instrument suku bunga. Merujuk pada apa yang telah dipraktikkan pemerintah Islam pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin, saat itu perekonomian yang berlaku adalah perekonomian dagang. Saat para pedagang mengeksport dagangannya maka secara tidak langsung juga mengimpor dinar atau dirham. Begitu juga ketika mengimpor komoditi tertentu mereka juga pada saat yang sama mengeksport dinar atau dirham. Apa yang dilakukan oleh para pedagang tersebut telah menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran uang dari keseimbangan pasar barang dan jasa<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah," *Al-Buhuts* 13, no. 1 (2017): 104–17, <https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>.

<sup>10</sup> Nur aini Latifah, "Kebijakan Pengendalian," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 103–18, <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>.

<sup>11</sup> Evi Agustiana, "Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syariah," 2022.

<sup>12</sup> A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (1st Ed.)*. (Gema Insani, 2001).

Penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban membayar zakat 2,5% setiap tahun akan dapat mengurangi permintaan uang yang dilakukan secara spekulasi dan penyimpanan yang ditimbulkan dari suku bunga, serta dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik pada permintaan akan uang. Karena dengan tidak adanya bunga para pemilik modal dihadapkan kepada dua pilihan antara menahan uangnya dalam bentuk tunai tanpa mendapatkan nilai tambah, atau memutar uangnya dalam bentuk investasi dengan skema profit and loss sharing yang dapat memberikan imbal hasil dan resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya<sup>13</sup>.

Kebijakan moneter dalam lingkup islam pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam yang harus diterapkan dalam ekonomi islam. Kebijakan moneter islam pastinya harus terhindar dari unsur perbuatan riba yang dimana riba ini hampir sama dengan istilah bunga dalam konvensional. Sehingga dengan adanya pelangan riba dalam islam itu akan membuat manajemen ekonomi islam menjadi baik. Adapun prinsip – prinsip ekonomi islam yaitu:

1. Kekuasaan tertinggi hanya milik sang penguasa yaitu Allah SWT.
2. Manusia hanya sebagai pemimpin bukan pemilik.
3. Semua yang di peroleh manusia itu karena Allah SWT.
4. Harta yang dimiliki tidak boleh di timbun.
5. Harta harus diinvestasikan.
6. Memiliki satu tujuan akhir yang pasti.
7. Kebijakan moneter bersifat forward looking.<sup>14</sup>

### **Instrumen Kebijakan Moneter Islam**

Instrumen atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.<sup>15</sup> Instrumen besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan) didukung dengan instrumen moneter berupa:

- a) *Statutory Reserve Requirement* (cadangan wajib minimum). Banyak bank sentral yang melakukan reduksi dan eliminasi cadangan minimum untuk menjadikan bank lebih kompetitif. Akan tetapi dalam ekonomi Islam discount rate dan open market operation tidak dapat diterapkan, maka instrumen yang paling memungkinkan adalah bank konvensional diwajibkan menempatkan sebagian dari dananya yang berasal dari demand deposits pada bank sentral sebagai cadangan wajib. Reserve requirement ini hanya berlaku untuk demand deposit, sedangkan mudharabah deposit tidak memerlukan cadangan deposit, karena mudharabah merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut dan memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini reserve requirement diterapkan terhadap

<sup>13</sup> Umer Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (M. Sonhaji (Ed.); 1st Ed.). (Dana Bhakti Primayasa, 1997).

<sup>14</sup> Agustiana, "Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syari'ah."

<sup>15</sup> Siti Aisyah et al., "Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam" VII (2019).

## ***Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi - Sir Haykal Alam Amirullah dan Muhammad Yazid***

total deposit karena kesulitan membedakan antara demand dan saving deposit. Sedangkan dalam ekonomi Islam lebih mudah membedakannya. Selain itu penerapan reserve requirement terhadap total deposit tidak hanya untuk mengatur penyaluran pembiayaan tetapi juga untuk menjamin kebutuhan dan menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan. Reserve requirement yang diberlakukan di Sudan sedikitnya 20% (10% untuk simpanan dalam mata uang asing) dari total dana masyarakat (kecuali simpanan investasi) yang harus disimpan di BOS (Bank sentral Sudan). Di Iran, ketentuan rasio cadangan antara 10%-30% sedangkan di Indonesia giro wajib minimum (GWM) berkisar antara 5% dalam bentuk IDR dan 3% dari dana pihak ketiga dalam bentuk mata uang asing.

- b) *Financing Ceiling*: Selain *Reserve requirement*, keberhasilan manajemen moneter perlu juga mempertimbangkan sistem penyaluran pembiayaan yang efektif agar tidak melampaui jumlah yang ditargetkan. Pagu pembiayaan penting untuk menjamin total pembiayaan yang disalurkan konsisten dengan target moneter. Misalnya di Sudan plafon pembiayaan untuk sektor prioritas di daerah tersebut adalah pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin, dan lain-lain. Dengan ketentuan 90% dari dana pembiayaan harus dialokasikan pada sektor prioritas tersebut.
- c) *Government Deposits*: Instrumen moneter yang juga mempengaruhi cadangan dari bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen Ini terbukti cukup efektif di Saudi Arabia terutama dalam mempengaruhi cadangan bank komersial secara langsung dan fungsinya sama seperti open market operation yang mempengaruhi cadangan bank komersial secara tidak langsung.
- d) *Common pool*: *Common pool* adalah instrumen yang mensyaratkan bank-bank- komersial menyisihkan sebagian dari deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.
- e) *Moral Suasion*: Merupakan instrumen yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi perbankan secara umum.
- f) Perubahan tingkat *loss & profit sharing ratio*: Adanya variasi rasio laba rugi untuk aktivitas mudharabah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada para wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudharabah di bank komersial sangat disarankan, mengingat dalam mekanisme mudharabah keuntungan yang diperoleh bisa berubah-ubah dan rasio bagi hasil dan rugi ditentukan oleh keuntungannya<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Achmad Kholiq, *TEORI MONETER ISLAM ( Edisi Revisi )*, 2016.

Menurut Muhammad secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:

- 1) *Reserve Ratio*: Suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
- 2) *Moral Suasion*: Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
- 3) *Lending Ratio*: Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
- 4) *Refinance Ratio*: Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.
- 5) *Profit Sharing Ratio*. Rasio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.
- 6) *Islamic Sukuk*. Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.
- 7) *Government Investment Certificate*. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC (*Government Instrument Certificate*).
- 8) Reksadana Syariah. Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" yang berarti uang. Sehingga Reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Menurut UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan Reksadana Syariah mengandung pengertian sebagai Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana Syariah misalnya tidak menginvestasikan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, seperti membangun pabrik minuman keras yang mengandung alkohol, beternak babi, dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami* (Salemba Empat, 2002).

## ***Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi - Sir Haykal Alam Amirullah dan Muhammad Yazid***

Beberapa instrumen dalam kebijakan moneter Islam, seperti saham komersial dan sertifikat musyarakah berdasarkan PLS, dapat digunakan untuk menggantikan instrumen berbasis bunga. Tujuannya ialah untuk mengontrol jumlah uang yang mengalir. Selain itu, instrumen seperti Kebijakan sektor Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan sertifikasi Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpotensi termasuk dalam kategori ini. Publikasi SBIS oleh BI dan penjualan SBIS kepada masyarakat akan menurunkan JUB. Dalam penetapan kebijakan moneter kontraktif, studi ini menunjukkan ini. Kebijakan ini dimulai pada saat ekonomi beroperasi secara berlebihan, yang mengakibatkan inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, penurunan JUB diperkirakan akan mengakibatkan penurunan permintaan, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan inflasi.

Namun, pelaksanaan semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang disebutkan di atas, mulai dari implementasi kebijakan yang ditetapkan hingga implementasinya, sangat sulit dan membutuhkan waktu. Metode ini dimulai dengan keputusan otoritas perbankan pusat, yang merupakan mitra negara, untuk mengubah instrumen moneter. Berbagai faktor ekonomi dan keuangan juga dipengaruhi oleh tujuan operasional organisasi. melalui interaksi antara bank sentral, lembaga perbankan dan sektor keuangan, diikuti oleh sektor swasta.<sup>18</sup>

### **Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi**

#### **Inflasi**

Kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem moneter konvensional. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mencakup larangan riba (bunga) dan orientasi pada keadilan sosial, memengaruhi cara kebijakan moneter diimplementasikan untuk mengendalikan inflasi. Berikut adalah beberapa cara kebijakan moneter Islam dapat membantu mengendalikan inflasi:

- a) Larangan Riba (Bunga): Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba. Dalam konteks kebijakan moneter, hal ini dapat mencegah praktik bunga yang berlebihan yang sering menjadi penyebab inflasi. Dengan menghindari sistem bunga, kebijakan moneter Islam dapat membantu mengurangi tekanan inflasi.
- b) Pengawasan Transparan: Otoritas moneter dalam ekonomi Islam diharapkan untuk menjalankan pengawasan yang transparan terhadap sistem moneter secara keseluruhan. Dengan transparansi yang tinggi, tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dapat diidentifikasi dan diatasi, mengurangi potensi untuk ketidakstabilan harga yang dapat menyebabkan inflasi.
- c) Pengelolaan Uang dan Kredit: Kebijakan moneter Islam melibatkan pengelolaan uang dan kredit dengan cermat untuk mencegah peningkatan berlebihan dalam jumlah uang beredar. Dengan mengendalikan penawaran uang dan kredit, otoritas moneter dapat

---

<sup>18</sup> Aulia Rahma et al., "Dampak Kebijakan Moneter Islam Terhadap Stabilitas Harga Dan Inflasi" 8, no. 3 (2024): 26070–76.

mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan yang tidak seimbang.

- d) Fokus pada Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam tercermin dalam kebijakan moneter dengan menekankan distribusi yang adil dari keuntungan dan beban inflasi. Ini dapat melibatkan penilaian kembali kebijakan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk memastikan bahwa dampak inflasi tidak memberatkan kelompok tertentu secara tidak adil.
- e) Investasi Produktif: Kebijakan moneter Islam dapat mengarah pada dorongan untuk investasi produktif yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian. Dengan fokus pada proyek-proyek yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil, kebijakan ini dapat membantu mencegah pemicu inflasi yang mungkin timbul dari peningkatan permintaan tanpa peningkatan produksi.
- f) Pengelolaan Risiko: Kebijakan moneter Islam dapat memasukkan prinsip pengelolaan risiko yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Ini melibatkan evaluasi risiko ekonomi dan finansial dengan mempertimbangkan aspek etika dan keadilan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan moneter Islam diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan mengendalikan inflasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi<sup>19</sup>

Studi yang dilakukan oleh Mulyani, mengenai inflasi dan upaya penanggulangannya dalam konteks Islam menunjukkan bahwa inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga secara umum yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kata lain, inflasi juga mencerminkan penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Secara umum, inflasi disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap barang, kenaikan biaya produksi, dan tingginya peredaran uang dalam masyarakat. Berdasarkan sifatnya, inflasi dapat dibagi menjadi inflasi merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), dan inflasi tinggi (*hyperinflation*). Sebab terjadinya inflasi dibedakan menjadi Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation, sedangkan asalnya dapat dibagi menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam perspektif harapan masyarakat, inflasi dibagi menjadi Expected Inflation dan Unexpected Inflation. Dalam ekonomi konvensional, penanggulangan inflasi dilakukan melalui penerapan kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter/nonfiskal. Namun, dalam perspektif Islam, penanganan inflasi dilakukan dengan mencetak uang dalam jumlah yang rendah atau minimal, menerapkan strategi Dues Idle Fund, dan mengimplementasikan kebijakan fiskal.<sup>20</sup>

## **Krisis Moneter**

Ekonomi Islam memiliki mekanisme yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan moneter. Hal ini menjadi pelajaran penting ketika menghadapi permasalahan, termasuk

---

<sup>19</sup> Yovita Sari and Amir Indrabudiman, "Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi Grafik Inflasi YoY Nasional Indonesia 2019-2023" 10, no. 01 (2024): 621–26.

<sup>20</sup> Reni Mulyani, "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam" 1, no. c (2020).

## ***Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi - Sir Haykal Alam Amirullah dan Muhammad Yazid***

permasalahan ekonomi. Artinya permasalahan tidak boleh diselesaikan hanya dengan satu metode/pendekatan/metode saja, namun banyak metode/pendekatan/metode yang harus dipadukan agar mempunyai peluang keberhasilan yang lebih tinggi<sup>21</sup>. Beberapa pendekatan/metode yang bisa dilakukan sebagai solusi masalah ekonomi khususnya disaat krisis sebagai substitusi dan komplementer utang adalah :

1. Meminta Bantuan Negara Lain dengan Melakukan Pertukaran  
Strategi Nabi Ya'qub untuk menghadapi krisis pangan di negaranya yaitu dengan meminta bantuan negara lain dengan melakukan pertukaran barang-barang yang dipunyai dengan barang yang dibutuhkan, prinsip barter/pertukaran itu bisa juga dengan menggunakan mata uang sebagai alat tukar.
2. Menghilangkan Riba  
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa utang dengan menetapkan bunga bukan menyelesaikan masalah justru dengan tambahan bunga semakin menambah masalah. Menghapuskan sistem riba menjadi satu keharusan. Basis bunga harus digantikan dengan basis mudharabah atau usaha bersama atau kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang adil diantara semua pihak. Apalagi islam telah melarang segala bentuk riba, oleh karenanya ia harus dihapuskan dalam sistem perekonomian.
3. Zakat  
Zakat merupakan jembatan yang mengantarkan umat muslim menuju kesejahteraan dan kejayaan. Dengan zakat dapat memajukan perekonomian bangsa dan mensejahterakan umat. Zakat memiliki 3 peran antara lain pemberantasan kemiskinan, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi. Zakat memberantas kemiskinan karena dengan zakat yang disalurkan kepada orang fakir miskin maka taraf hidupnya akan naik begitu juga daya belinya sehingga tidak miskin lagi dan mampu memenuhi kebutuhannya namun tidak bisa terus menerus dibantu oleh zakat perlu aksi lain yaitu menyiapkan lapangan pekerjaan sehingga orang fakir miskin yang masih bisa bekerja harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya yang akan dijelaskan di point berikutnya. Zakat juga menstabilkan perekonomian, karena kesenjangan sosial ekonomi antara kaya dan miskin dapat diminimalisir, adanya distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin membuat ekonomi semakin stabil.
4. Kewajiban Bekerja  
Selain zakat, kewajiban bekerja juga jadi kunci untuk mengurangi angka kemiskinan. Setiap muslim diharuskan untuk bekerja. Selain sebagai ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, bekerja juga menjadi solusi dalam masalah ekonomi. Sesungguhnya Allah telah berjanji akan menyediakan makanan bagi seluruh makhluk-Nya. Namun janji tersebut tidak dapat dipenuhi dengan "cek kosong". Seseorang akan mampu mencari nafkah bila rela merantau dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Karena Allah

---

<sup>21</sup> Shakira et al., "Kebijakan Moneter Menurut Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Penyebab Krisis Moneter."

menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan umat manusia. Barangsiapa mau berusaha dan bekerja maka ia akan mendapat rezeki dan keberkahandari Allah. Seseorang yang berusaha keras akan mampu mengubah nasibnya menjadi lebih baik dari sebelumnya<sup>22</sup>.

## **Kesimpulan**

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang paling penting untuk mengatasi krisis ekonomi dan juga untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mengatur inflasi dengan baik, namun dalam perspektif islam kebijakan moneter harus mengarah pada keadilan dan kemaslahatan semua umat.

Sistem moneter islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Prinsip utama dalam sistem moneter Islam adalah larangan riba (bunga) dan maysir (spekulasi). Penerapan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain : *Reserve Ratio, Moral Suassion, Lending Ratio, Refinance Ratio, ProfitSharing Ratio, Islamic Sukuk, Government Investment Certificate, Reksadana syariah.*

Kebijakan moneter Islam dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai cara. Diantara lain sebagai berikut

1. Mengurangi jumlah uang beredar: Inflasi terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, maka permintaan barang dan jasa juga akan berkurang, sehingga dapat membantu menurunkan inflasi.
2. Mendorong investasi: Investasi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi, sehingga dapat memenuhi permintaan agregat dan menjaga stabilitas harga. Bank sentral dapat mendorong investasi dengan menurunkan suku bunga. Namun kasus menurunkan suku bunga ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan larangan riba dalam islam
3. Mengelola nilai tukar mata uang: Nilai tukar yang stabil dapat membantu menjaga harga barang-barang impor dan mengurangi inflasi impor.

## **Daftar Pustaka**

Agustiana, Evi. "Kebijakan Pengendalian Moneter Di Indonesia Dalam Perspektif Perbankan Syari'ah," 2022.

Aisyah, Siti, Universitas Islam, Indragiri Tembilahan, Siti Nurmala, Universitas Islam, and Indragiri Tembilahan. "Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam" VII (2019).

Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Kebijakan Moneter Syariah." *Al-Buhuts* 13, no. 1 (2017): 104–17.

---

<sup>22</sup> Rachmad Risqy Kurniawan and Email Talithadp@gmail.com, "Ragam Solusi Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi" x (n.d.).

**Model Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi - Sir Haykal Alam Amirullah dan Muhammad Yazid**

<https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>.

Ananda, Dea Putri, Halimatiara Halimatiara, Riska Ardila Hasanah, Rizki Maulana, and Dika Syahputra. "Kebijakan Moneter Dalam Islam." *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 120–25. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2864>.

Annur, Saiful. "Saiful Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif)," (Palembang: Noer Fikri, 2014). 1 37," 2014, 37–44.

Chapra, Umer. *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil (M. Sonhaji (Ed.); 1st Ed.)*. Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Helin G Yudawisastra, Kasful Anwar, Hesti Umiyati, Isep Amas Priatna, Ahmad Zainuddin Syarifuddin Sulaiman, Budi Rustandi Kartawinata, Umar, and Roikhan Mochamad Aziz. Sattar, Edi Murdiyanto, Taufik Akbar, Amalia Wahyuni. *Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*, 2022.

Irawan, Heri, Srianti Permata, Eggy Armand Ramdani, Bella Jastacia, Satria Utama, Arridho Adbuh, Afidah Nur Aslamah, et al. "Ekonomi Moneter Islam." *Az-Zahra Media Society* 3, no. 1 (2023): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Karim, A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (1st Ed.)*. Gema Insani, 2001.

Kholiq, Achmad. *TEORI MONETER ISLAM ( Edisi Revisi )*, 2016.

Kurniawan, Rachmad Risqy, and Email Talithadp@gmail.com. "Ragam Solusi Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi" x (n.d.).

Latifah, Nur aini. "Kebijakan Pengendalian." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 103–18. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>.

Muhammad. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*. Salemba Empat, 2002.

Mulyani, Reni. "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam" 1, no. c (2020).

Rahma, Aulia, Laila Rahmayuni Rangkuti, Chindy Jihan Najiyah, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Islam Uin-su Medan, and Fakultas Ekonomi. "Dampak Kebijakan Moneter Islam Terhadap Stabilitas Harga Dan Inflasi" 8, no. 3 (2024): 26070–76.

Sari, Yovita, and Amir Indrabudiman. "Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi Grafik Inflasi YoY Nasional Indonesia 2019-2023" 10, no. 01 (2024): 621–26.

Shakira, F, N H Fauziah, S O V Wiryana, and ... "Kebijakan Moneter Menurut Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Penyebab Krisis Moneter." *Brilian Dinamis ...* 6, no. 3 (2024): 15–30. <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/article/view/2550%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/article/download/2550/2577>.

Warjiyo, Perry, and Solikin. *Kebijakan Moneter Indonesia. Jurnal Manajemen Maranatha*. Vol. 3, 2003.